

BAB II

Perubahan Politik dan Ekonomi Turki Sejak Pemerintahan Profil *Adalet ve Kalkinma Partisi* AKP

A. Profil *Adalet ve Kalkinma Partisi* (AKP)

Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP) merupakan hasil bentukan dari partai-partai basis Islam terdahulu yang dulunya dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi Turki. Partai-partai Islam pada era awal berdirinya Republik Turki mendapat tekanan dari pemerintah dan sulit untuk tampil dalam kancah politik Turki. Namun, sejak tahun 1961 dengan adanya konstitusi baru yang lebih liberal, memberikan sedikit ruang kebebasan untuk berpendapat bagi kelompok keagamaan untuk mengemukakan pendapat. Dalam situasi yang tampaknya lebih bersahabat ini, memberikan kesempatan bagi kelompok Islamis untuk mendirikan partai berorientasi Islam di Turki. Partai basis Islam yang dibentuk pada masa itu adalah partai Islam pimpinan Necmettin Erbakan, yaitu Partai Tatanan Nasional (Milli Nizam Partisi, disingkat MNP) yang dibentuk pada tahun 1969. Namun tidak berselang lama, partai tersebut dibubarkan oleh mahkamah konstitusi Turki atas dasar pertimbangan “menggunakan nilai agama sebagai tujuan politiknya”, yang dianggap bertentangan dengan ide sekularisme yang dianut oleh Republik Turki. Sehingga elit-elit sekuler Turki menolak untuk memberikan kebebasan berpolitik bagi masyarakat yang terinspirasi dan mendukung nilai-nilai Islam. (Erdogan, 1999)

Militer yang berusaha menegakkan ideologi sekuler yang tercantum dalam konstitusi Republik Turki berpengaruh besar dalam menjaga kestabilan politik

Turki. Namun partai yang berhaluan Islam tidak dihilangkan melainkan diperbolehkan untuk beraktivitas atau dengan kata lain kelompok-kelompok Islam ditekan aktivitas politiknya oleh pemerintah militer. Hal ini dikarenakan militer berusaha membendung perkembangan paham komunisme di era perang dingin. Partai Islamis baru mendapat pengawasan yang sangat ketat pada saat memanasnya isu “anti-sekularisme” di Turki tahun 1997 dan sempat dibubarkan pada tahun 1998. (Alfan, 2015)

Aksi militer yang mengambil alih pemerintahan ditandai dengan kudeta 28 Februari 1997 yang sering disebut dengan “Proses Februari 1997 atau kudeta Post modern”, dan dari kudeta Februari 1997 tersebut militer mengajukan memorandum kepada parlemen yang tujuannya untuk memastikan bahwa ideologi sekularisme ditegakkan, negara mengontrol pendidikan Islam, pelarangan penggunaan fasilitas keagamaan untuk maksud politik, dikendalikannya kelompok media yang menentang militer, mantan anggota militer yang pernah menentang sekularisme tidak diizinkan untuk bekerja di birokrasi pemerintahan atau sektor swasta manapun, pencegahan pengaruh ekstrimis ke dalam tubuh militer, perguruan tinggi, peradilan, dan birokrasi, penyelesaian masalah politik di Turki bukan berdasar pada komunitas agama. (Alfan, 2015) Tekanan-tekanan tersebut membuat partai Islam harus dibubarkan serta menghasilkan respon dari para politisi Islamis yang berusaha untuk tetap eksis di kancah perpolitikan Turki.

Setelah partai berorientasi Islam dibubarkan, para aktivis partai (elit Partai) tersebut kemudian membentuk partai Kebaikan (dalam bahasa Turki disebut dengan Fazilet Partisi, FP) tahun 1998 yang di dalamnya terpecah menjadi dua faksi. Faksi pertama adalah mereka yang tetap berpegang teguh pada pemikiran

politik Erbakan, para tradisional, dan faksi kedua adalah mereka yang kontra dengan faksi tradisional dan memilih pemikiran politik yang realistis yang dapat menguntungkan, yaitu faksi reformis. (Alfan, 2015) Faksi tradisional, yang dipimpin oleh Recai Kutan, lebih mendominasi dalam kepengurusan partai sehingga faksi reformis, yang dipimpin Abdullah Gul, terpinggirkan dari partai ini. Perseteruan antara faksi tradisional dan faksi reformis mencapai puncaknya pada pasca-kongres I FP di bulan Mei 2000, saat Abdullah Gul dikalahkan Kutan, kemudian Abdullah Gul dilaporkan ke komisi disiplin partai dengan alasan telah mengadakan pertemuan dengan Deniz Baykal, pemimpin CHP. (Alfan, 2015) Satu tahun kemudian, yakni pada Juni 2001, Fazilet Partisi dibubarkan pemerintah dengan alasan bahwa partai ini anti-sekuler. Kedua faksi dalam FP, faksi tradisional dan faksi reformis, memutuskan untuk berpisah dan menempuh jalan politik masing-masing. Faksi tradisional yang dipimpin Kutan membentuk Partai Kebahagiaan (*Saadet Partisi*, SP), sedangkan faksi reformis yang dipimpin Abdullah Gul memilih bergabung dengan Recep Tayyip Erdogan dan membentuk partai Keadilan dan Pembangunan (*Adalet ve Kalkinma Partisi*, AKP). (Alfan, 2015)

Setelah dibubarkan, pecahan dari partai Islamis muncul lagi untuk mengikuti pemilu tahun 2002. Pecahan dari partai Islamis yang “mendadak populer” adalah *Adalet ve Kalkinma Partisi* (AKP) yang berhasil menang telak pada pemilu 2002. Penyebabnya adalah kandidat-kandidat AKP yang populer di masyarakat dan ideologi partai yang moderat dengan mendukung pasar bebas, demokrasi-konservatif, menekankan nilai-nilai tradisional Turki-religius, pro-Uni Eropa. Selain itu, krisis ekonomi yang dialami Turki pada tahun 2000 membuat

masyarakat kecewa dengan pemerintahan sekuler karena mereka dinilai tidak bisa mengatasi masalah krisis ekonomi tersebut, sehingga masyarakat beralih pada AKP yang punya figur berprestasi dalam membangun kota Istanbul. (Alfan, 2015)

Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP) oleh masyarakat luar dianggap sebagai partai yang berhaluan Islam dan berorientasi pada nilai-nilai ajaran Islam. Anggapan ini muncul di tengah masyarakat luas karena AKP merupakan “keturunan” dari partai Islam di masa lalu, yang mana para pembentuk partai ini adalah pengikut dari ide-ide Necmettin Erbakan. Seorang peneliti dari Cambridge University, M. Hakan Yavuz melakukan studi pada partai ini mengatakan bahwa di dalam AKP terdapat dua haluan ideologis yaitu haluan Turki-Islam dan haluan Islam-Turki. Haluan Turki-Islam lebih mendorong persaudaraan politik dan rasa nasionalisme daripada rasa persaudaraan yang berdasar sesama muslim, tapi tetap menganggap bahwa Islam adalah asas yang penting bagi kebudayaan Turki. Sedangkan haluan Islam-Turki lebih mendorong persaudaraan Islam, baru kemudian rasa persaudaraan nasionalisme. Bagi haluan Islam-Turki kebudayaan dan identitas bangsa merupakan cerminan dari nilai-nilai Islam era Dinasti Ustmaniyah, dan haluan ini memiliki keraguan terhadap ideologi kemalisme yang diterapkan di Turki. (Alfan, 2015)

Meskipun banyak yang menganggap bahwa partai ini adalah partai berorientasi Islam, dari pihak partai ini sendiri malah menolak diklasifikasikan sebagai partai berorientasi Islam. Dokumen-dokumen resmi dan pidato-pidato para petinggi partai yang menekankan bahwa *Adalet ve Kalkinma Partisi* (AKP) adalah partai demokrat-konservatif dan bukan partai Islam. Salah satu contoh pidato kader AKP yang mengkritik media-media yang mengatakan bahwa AKP merupakan

Partai Islam, ungkapan yang disampaikan oleh Erdoğan yang mengatakan bahwa AKP bukan partai Islamis melainkan partai demokrat-konservatif. (Taşpınar, 2012) Selain itu, pidato dari Hüseyin Çelik yang dalam pidatonya mengkritik media barat yang dalam mendeskripsikan AKP selalu menggunakan kata-kata “partai Islam”, “Islamis”, “berbasis Islam” dan sebagainya, Celik juga menekankan dalam pidatonya bahwa AKP adalah partai Demokrat-Konservatif yang menekankan nilai-nilai moral dan sosial. (Hürriyet Daily News, 2010)

Dengan adanya pernyataan dari para elit-elit *Adalet ve Kalkınma Partisi* (AKP) yang menyatakan bahwa *Adalet ve Kalkınma Partisi* (AKP) merupakan partai demokrat-konserfatif yang menjunjung tinggi nilai moral dan sosial, serta bukan merupakan partai berorientasi Islam, tentu terdapat perbedaan dengan partai-partai “induk” yang dulunya adalah partai tempat para elit AKP berlaga dalam ranah politik di Turki. Perbedaan-perbedaan tersebut lebih cenderung bersifat transformatif, yaitu *Adalet ve Kalkınma Partisi* (AKP) menjadi berbeda setelah para elitnya mendapat berbagai pengalaman dalam berpolitik di dalam partai-partai induk yang terdahulu. Partai-partai induk tersebut misalnya adalah Partai Kesejahteraan (PK) atau dalam bahasa Turki disebut Refah Patisi (RP) dan partai Kebaikan (dalam bahasa Turki disebut dengan Fazilet Partisi, FP). (Alfian, 2015)

Menurut Ziya Öniş perbedaan-perbedaan antara *Adalet ve Kalkınma Partisi* (AKP), *Refah Patisi* (RP), dan *Fazilet Partisi* (FP) terlihat dalam beberapa aspek. Aspek-aspek tersebut adalah aspek peran ekonomi negara, aspek demokratisasi, Nasionalisme, Nilai keagamaan dan nilai moral, Sentralisasi dan Pemerintahan lokal, Orientasi kebijakan luar negeri, dan gaya berpolitik. (Öniş, 2006)

Pada Aspek peran ekonomi negara *Refah Partisi* (RP) sangat menekankan peran negara dalam perekonomian seperti mendistribusikan ekonomi, selain itu pemerintah juga harus memiliki peran aktif dalam memberikan subsidi dalam pembangunan industri. Menurut partai ini, privatisasi tidak ditekankan. Menurut *Fazilet Partisi* (FP) dalam aspek peran ekonomi negara terdapat beberapa acuan dalam peran negara untuk mendistribusikan perekonomian, lebih menekankan pada persaingan atau kompetisi pasar, dan yakin pada kekuatan pasar dan privatisasi. Sedangkan menurut *Adalet ve Kalkinma Partisi* (AKP) perekonomian negara harus sejalan dengan nilai-nilai ekonomi liberal, menekankan investasi asing, mendukung privatisasi dan regulasi ekonomi pasar yang tepat, mempertimbangkan keadilan sosial, menyediakan layanan sosial dalam batasan anggaran belanja yang sesuai dengan program IMF. (Öniş, 2006)

Dalam aspek demokratisasi, menurut *Refah Partisi* (RP) hak-hak individu atau perseorangan tidak dipertimbangkan, partai ini sangat menekankan hak-hak sosial dan adanya kebebasan melakukan praktik-praktik keagamaan. Menurut *Fazilet Partisi* (FP) hak-hak individu dan hak asasi manusia sangat ditekankan, sebagai bagian dari hak berdemokrasi terutama dalam lingkup menjalankan praktik-praktik keagamaan. Sedangkan menurut *Adalet ve Kalkinma Partisi* (AKP) konsolidasi demokratik sangat ditekankan dengan adanya perbaikan-perbaikan secara terus-menerus dalam bidang hak-hak asasi manusia dan hak-hak warga sipil, adanya keterlibatan yang kuat dari masyarakat madani, dan sesekali mempertimbangkan kebebasan beragama. (Öniş, 2006)

Dalam aspek nasionalisme, *Refah Partisi* (RP) sangat besar rasa nasionalismenya dan menginginkan Turki memiliki peran yang besar sebagai

pemimpin bagi dunia Islam. Sedangkan *Fazilet Partisi* (FP) tidak begitu menonjolkan rasa nasionalisme. Dan *Adalet ve Kalkinma Partisi* (AKP) sangat kosmopolitan dalam cara berpandang, elemen-elemen nasionalistis agak diredupkan. (Öniş, 2006)

Dari segi agama dan nilai moral, *Refah Partisi* (RP) sangat kuat dalam menonjolkan nilai keagamaan. Partai ini secara spesifik membuat garis besar rekomendasi-rekomendasi yang secara khusus mengambil referensi dari nilai-nilai dan ajaran Islam. Hal tersebut yang menjadikan pembeda atau karakteristik utama dari program-program *Refah Partisi* (RP). Sedangkan *Fazilet Partisi* (FP) menekankan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai moral meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan referensi dari Islam atau nilai-nilai Islam. Partai ini, *Fazilet Partisi* (FP), mendorong adanya kebebasan beragama sebagai bagian dari agenda hak-hak individu dan demokratisasi yang lebih luas. Sedangkan *Adalet ve Kalkinma Partisi* (AKP) menggunakan aturan-aturan dari sekularisme sebagai titik dasar-dasar referensi. Prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai moral dianggap sebagai norma sosial yang berkembang secara luas di kalangan masyarakat Turki dan bukan secara spesifik menekankan pada nilai-nilai Islam. Partai ini juga beranggapan bahwa kebebasan beragama merupakan program yang lebih luas dari demokratisasi. (Öniş, 2006)

Dari segi bentuk pemerintahan sentralisasi dan desentralisasi/pemerintah lokal, *Refah Partisi* (RP) menekankan adanya peran aktif dari pemerintah pusat dan sangat sedikit mengacu pada pemerintahan di bawahnya atau pemerintah lokal. Sedangkan Menurut *Fazilet Partisi* (FP), perlu diterapkannya desentralisasi dan penyebaran wewenang atau kekuasaan kepada pemerintah lokal. Menurut *Adalet*

ve Kalkinma Partisi (AKP), senada dengan *Refah Partisi*, sangat menekankan pada desentralisasi dan kapasitas pembuatan kebijakan dari pemerintah-pemerintah lokal. (Öniş, 2006)

Dalam aspek orientasi kebijakan luar negeri, *Refah Partisi* (RP) sangat anti-Barat dan anti-Uni Eropa, serta dengan keras menolak keberadaan Israel dan berusaha menjalin hubungan yang lebih dengan dunia Islam. Sedangkan *Fazilet Partisi* (FP) lebih tertarik pada kebijakan luar negeri dengan pendekatan yang aktif dan seimbang, menolak sikap-sikap yang anti terhadap barat maupun anti-Uni Eropa, dan tidak secara eksplisit atau terang-terangan merujuk kepada negara-negara muslim. *Adalet ve Kalkinma Partisi* (AKP) memiliki sikap yang sangat berbeda, partai ini (*Adalet ve Kalkinma Partisi*, AKP) menyatakan sangat pro-Barat dan Pro-Uni Eropa dan memiliki komitmen penuh dan kuat untuk menjadi anggota Uni Eropa, bersikap terbuka dalam menyetujui penyelesaian masalah pada isu-isu luar negeri yang dianggap penting, misalnya kasus Siprus, serta mengikuti pendekatan yang seimbang terhadap negara-negara Timur Tengah. (Öniş, 2006)

Dalam gaya berpolitik partai-partai tersebut juga memiliki ciri khas asing. *Refah Partisi* (RP) memiliki gaya berpolitik yang agresif, asertif atau tegas, dan percaya diri, serta, partai ini sering kali menggunakan retorika-retorika populis. Sedangkan gaya berpolitik *Fazilet Partisi* (FP) cenderung lebih defensif dan lebih tenang. *Adalet ve Kalkinma Partisi* (AKP) memiliki gaya berpolitik yang lebih menekankan pada berdialog dan membangun konsensus, cenderung mengatakan partainya sebagai ‘Demokrat Konservatif’ dan mendefinisikan partainya secara terus-menerus sebagai ‘partai tengah’. (Öniş, 2006)

B. Perubahan dalam Bidang Ekonomi Turki pada Pemerintahan *Adalet ve Kalkinma Partisi*

Sebelum *Adalet ve Kalkinma Partisi* (AKP) menang dalam pemilihan umum tahun 2002, kondisi ekonomi Turki sedang mengalami krisis ekonomi. Krisis ekonomi itu disebut sebagai krisis ekonomi terbesar dalam sejarah Republik Turki jika dibandingkan dengan krisis ekonomi lainnya yang pernah melanda Turki. Setidaknya telah terjadi tiga kali krisis ekonomi dalam sejarah Republik Turki yaitu yang pertama pada tahun 1930, 1970, dan tahun 2000. Akibat dari terjadinya gejolak politik yang tidak stabil di Turki pada masa awal pembentukan Republik Turki, perekonomian Turki juga terkena dampaknya. (Onder, 1990) Pemerintah Turki selama awal 1930-an melakukan pemulihan ekonomi dan menyusun doktrin yang dikenal sebagai *etatism*, yaitu industrialisasi yang dipimpin negara dan menerapkan perekonomian tertutup. Namun perkembangan ekonomi Republik Turki, sejak berdirinya tahun 1923, berjalan lambat dan stagnan pada akhir 1940-an akibat perang dunia II. (Onder, 1990) Kemudian Pada tahun 1970 Turki dilanda krisis ekonomi yang pada saat itu pemerintah Turki gagal mengambil tindakan yang memadai untuk menghadapi efek dari kenaikan harga minyak dunia di tahun 1973-1974 yang membuat pemerintah melakukan pinjaman jangka pendek dari kreditur asing, yang berakibat pada kudeta militer di tahun 1971. Dan pada tahun 1979, krisis semakin memuncak, angka pengangguran meningkat, dan perindustrian tidak berproduksi secara maksimal. (Onder, 1990)

Krisis moneter yang pernah melanda berbagai negara mulai tahun 1998, mulai melanda Turki pada tahun 2000-2001. Pemerintah Turki saat itu dipandang tidak berhasil dalam menanggulangi masalah krisis ekonomi dan juga tidak mampu

mengatasi praktik korupsi di dalam pemerintahan. Pemerintahan sekuler yang dipimpin oleh Ecevit tidak mampu mengeluarkan Turki dari krisis ekonomi pada November 2000 yang kemudian bertambah parah dengan adanya krisis ekonomi pada Februari 2001. (Alfan, 2015) Krisis tersebut merupakan krisis ekonomi terparah dalam sejarah Turki yang ditandai dengan produk nasional bruto (*Gross National Product*, GNP) menurun sebanyak 9,4%, selain itu pendapatan per kapita anjlok dari 2.986 USD menjadi 2.110 USD per tahun. Krisis ekonomi tersebut juga menyebabkan pengangguran, banyak perusahaan skala kecil menjadi bangkrut, yang menjadikan krisis ekonomi ini dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Turki. (Alfan, 2015) Selain itu, Krisis ekonomi yang terjadi di Turki tahun 2000-2001 juga membawa dampak yang sangat dramatis yang ditandai dengan penurunan ekonomi secara struktural yang tidak dapat dikendalikan, terutama di sektor perbankan umum yang merupakan salah satu pendorong dalam menambah likuiditas dalam sistem ekonomi Turki. Kemudian sektor-sektor yang baru terkena dampak dari krisis ekonomi tahun 2001 ini adalah seluruh lapisan masyarakat Turki, orang-orang kaya maupun orang miskin, orang-orang bersekolah maupun yang tidak sekolah, semuanya merasakan dampak negatif dari krisis tersebut. Terjadi pengangguran yang terus meningkat disertai kebangkrutan yang terjadi secara meluas, terutama bagi sektor usaha kecil-menengah. Sektor perbankan merasakan dampak krisis secara drastis dan harus melakukan pengurangan jumlah yang besar dari karyawannya. Bahkan para konglomerat merasakan terjadinya pengurangan dari penghasilan keuntungan yang didapatkan akibat krisis 2001 ini. (Öniş, 2009)

Krisis ekonomi yang melanda Turki tersebut mulai dapat diselesaikan sejak kemenangan AKP. Setelah berhasil memenangkan pemilihan umum di tahun 2002 dan menjadi partai dominan dalam pemerintahan Turki, pemerintahan AKP membuat kebijakan yang sarat dengan nilai-nilai perubahan atau kebijakan reformis yang bertujuan untuk secara signifikan meningkatkan komitmen terhadap upaya pemerintah dalam menjaga kestabilan fiskal untuk jangka panjang dan mereformasi kebijakan politik terkait hubungan dengan Uni Eropa. (Öniş, 2009) Kebijakan-kebijakan yang bersifat reformis ini digagas oleh Uni Eropa dan *International Monetary Fund* (IMF), pada dasarnya didukung oleh kelompok-kelompok bisnis dari dalam negeri, baik itu konglomerat atau kelompok bisnis berskala besar maupun kelompok bisnis berskala menengah dan kecil. Bagi kelompok-kelompok bisnis ini, adanya kombinasi dalam perubahan politik dan ekonomi mampu membentuk peraturan-peraturan yang berdasarkan pada aturan dasar ekonomi yang mampu mengatasi ketidakseimbangan dan buruknya acuan dalam pembangunan pada era sebelumnya, yaitu kesuksesan perekonomiannya sangat bergantung pada hubungan politik yang bersifat patron-klien dan adanya dukungan dari pemerintah. (Öniş, 2009)

IMF telah terlibat dengan manajemen ekonomi makro di Turki baik sebelum dan setelah krisis, dan memberikan bantuan keuangan sebesar \$ 20,4 miliar, antara 1999 dan 2003. Setelah krisis, Turki menerapkan strategi untuk menaikkan suku bunga dan mempertahankan nilai tukar yang tinggi. Pemerintah Turki kemudian mengikuti kebijakan fiskal kontraksioner, dan berjanji untuk memenuhi tuntutan IMF yang berupa mengurangi subsidi untuk pertanian,

privatisasi, dan mengurangi peran sektor publik dalam kegiatan ekonomi. (Yeldan & Ünüvar, 2015)

Pertumbuhan yang cepat, didorong oleh arus masuk besar-besaran dari modal keuangan asing, yang terpikat oleh tingkat signifikan pengembalian tinggi yang ditawarkan di dalam negeri. sehingga salah satu fenomena yang paling sering diungkapkan di masa pemerintahan AKP pasca krisis 2001 adalah fenomena munculnya gelombang besar pada sektor investasi swasta baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang menjadi pendongkrak pemulihan ekonomi Turki paskah krisis 2001. (Yeldan & Ünüvar, 2015) Fenomena ini muncul dikarenakan Turki mampu memenuhi persyaratan anggaran yang ketat dari IMF yang hasilnya berupa turunnya angka inflasi hingga satu digit yang mampu meningkatkan rasa percaya diri dalam kecakapan pemerintah yang berkomitmen pada kestabilan dan perubahan, ditambah dengan jatuhnya tingkat suku bunga riil yang menjadi sebuah pertanda terhadap kepercayaan dari para investor. (Öniş, 2009)

Karakteristik yang mendasari aturan-aturan keuangan pasca krisis Turki sangat bergantung pada pemeliharaan suku bunga yang tinggi dalam mengantisipasi peningkatan arus modal asing ke dalam perekonomian domestik. Ditambah dengan kebijakan fiskal kontraksioner yang menyeluruh, program ini mendapat sumber utama pertumbuhannya pada aliran masuk dana asing. (Yeldan & Ünüvar, 2015) Selain itu, krisis ekonomi yang parah memicu keharusan reformasi pada aturan-aturan keuangan negara, termasuk amandemen dalam UU CBRT (*The Central Bank of the Republic of Turkey*) pada April 2001, yang kemudian memberikan independensi kepada Bank Sentral. Pada awal masa jabatan di pemerintahan, para aktor ekonomi AKP menggunakan retorika Bank Sentral yang independen ini

sebagai bagian dari strategi promosi dalam upaya untuk membangun kembali kepercayaan dari investor asing ke negara itu. (Yeldan & Ünüvar, 2015)

Kebijakan-kebijakan yang bersifat reformis dari pemerintahan AKP dalam mengatasi masalah perekonomian pasca krisis 2001 oleh Anakçı diklasifikasikan menjadi dua kelompok kebijakan umum yaitu kebijakan *re-Regulation* dan kebijakan *de-Regulation*. Kebijakan *re-Regulation* antara lain, sebagai berikut :

1. Peningkatan disiplin fiskal peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembuatan anggaran belanja negara, serta memperbaiki administrasi perpajakan.
 2. Penguatan otonomi Bank Sentral melalui perlindungan hukum.
 3. Meningkatkan otonomi Badan Pengatur dan Pengawas Bank dan memperketat regulasi perbankan dan sistem keuangan.
 4. Memperkuat kedudukan badan pengatur otonom di beberapa daerah ekonomi termasuk Energy dan komunikasi.
 5. Transparansi yang jauh lebih besar dalam proses privatisasi.
- (C, Anakçı, dalam Öniş, 2009)

Sedangkan kebijakan *de-Regulation* antara lain :

1. Liberalisasi ekonomi yang lebih lanjut seperti penghapusan monopoli negara dalam sektor listrik dan produksi tembakau.
2. Pengurangan tarif pajak perusahaan.
3. Mengurangi hambatan administratif untuk investasi asing langsung (*Foreign direct Investment, FDI*).
4. Pengurangan subsidi pertanian.

5. Revitalisasi program pertanian. (C, Anakçı, dalam Öniş, 2009)

Sejak AKP menjadi partai yang memerintah Turki kemajuan-kemajuan di bidang ekonomi mulai terlihat, sebagai hasil dari upaya pemerintahan AKP dalam melakukan perubahan-perubahan di bidang ekonomi dan sosial politik di Turki. Pemerintahan AKP menganggap bahwa perubahan mampu mengantarkan pada stabilitas yang lebih besar, selain itu Pemerintahan AKP juga menganggap bahwa faktor eksternal seperti dorongan untuk menjadi anggota di Uni Eropa atau tekanan dari *International Monetary Fund* (IMF), dapat menjadi penentu dalam memicu perubahan dan meningkatkan kesejahteraan. (Öztürk, 2011) Pada tahun 2003, Pemerintahan AKP melaksanakan program stabilitas yang ditawarkan oleh IMF serta mengadopsi kebijakan yang berisi strategi untuk menjadi anggota penuh Uni Eropa, sebagai pendorong dalam mewujudkan perubahan yang diharapkan. Langkah-langkah tersebut pada akhirnya membuahkan hasil, pada tahun 2002-2007 Turki mengalami kondisi terpanjang dalam pertumbuhan ekonomi yang tidak mengalami gangguan dengan rata-rata persentase sebesar 6-7% tiap tahunnya. (Öztürk, 2011) Kemudian pada tahun 2010, GDP per kapita Turki telah meningkat tiga kali lipat sejak tahun 2002, Majalah *Time* menyebutkan bahwa sejak AKP pertama berkuasa defisit APBN telah turun menjadi dua pertiga. Dari tahun 2002 sampai 2010, GDP tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 4,8%, lebih besar dari Rusia, Brasil dan Korea Selatan. Pada tahun 2010, GDP Turki tumbuh 8,9%. (Ghosh, 2011) Sehingga, untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, Turki mampu pulih dengan baik dari krisis ekonomi global tahun 2009 dan perekonomiannya membaik pada tahun 2010 dengan peningkatan lebih dari 7%

serta nilai ekspor naik lebih dari empat kali lipat dari 32 miliar USD pada tahun 2002 menjadi 132 miliar USD pada 2009. (Migdalovitz, 2011)

Karena pertumbuhan ekonomi Turki yang semakin kuat di bawah pemerintahan AKP yang dipimpin oleh Erdoğan, majalah *Newsweek* memberi julukan “*The Robust Man*” kepada Erdoğan. Selain itu, kolom *Newsweek* menjelaskan bahwa dengan perekonomian Turki yang kuat, kelompok G20 mampu mengungguli G7 di dalam tatanan ekonomi global, karena Turki, Brazil, India dan negara G20 lainnya semakin memainkan peran penting dalam perekonomian global. (Alfan, 2015) Pertumbuhan ekonomi Turki merupakan buah dari kebijakan orientasi ekspor yang diterapkan pada tahun 1980-an yang menjadikan Turki mandiri dan ekspansif dalam bidang perdagangan. Turki masih bergantung pada kerja sama dengan negara-negara Eropa seperti Jerman, Inggris, dan Italia. Namun di sisi lain, perdagangan dengan negara-negara Timur Tengah juga berkembang ketika Turki mulai mengajak negara-negara di Timur Tengah untuk mengadakan kawasan perdagangan bebas (*Free Trade area*), seperti dengan Yordania, Lebanon, dan Suriah. Sebagai dampak, perdagangan barang dan jasa serta perdagangan energi menjadikan Turki dan negara-negara tetangganya saling terikat. (Alfan, 2015)

Perkembangan ekonomi Turki yang baik setelah krisis ekonomi yang melanda Turki di tahun 2001, merupakan bentuk nyata dari upaya pemerintahan AKP untuk merealisasikan misi mereka yaitu menjadikan Turki sebagai negara dengan ekonomi yang besar di dunia. Peraturan-peraturan pasca krisis Turki di bawah pemerintahan AKP sedikit banyak mengikuti langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah negara berkembang di berbagai negara, yang bergantung pada

modal asing dan diharuskan mematuhi syarat untuk mengadopsi atau mengelola kebijakan kontraksioner untuk mendapatkan kepercayaan investor dan kredit internasional. Upaya tersebut hanya berfokus pada memperoleh anggaran yang seimbang, pengeluaran fiskal yang mapan, dan kebijakan moneter yang relatif kontraksioner dengan berkomitmen pada suku bunga riil yang tinggi. (Yeldan & Ünüvar, 2015)

C. Perubahan Politik Luar Negeri Turki pada Masa Pemerintahan *Adalet ve Kalkınma Partisi* (AKP)

Pergeseran dalam kebijakan Turki terhadap negara tetangganya yang dramatis dan dapat dijelaskan hanya dengan bertumpu pada faktor internasional, regional, dan domestik. Pada faktor internasional dan regional, yang berpengaruh besar dalam perubahan arah kebijakan Turki adalah pecahnya Uni Soviet. Sebagaimana Amerika Serikat dan sekutunya Eropa berusaha untuk mengisi kekosongan kekuasaan politik di kawasan Eurasia. Mereka telah mencoba untuk membuat Turki sebagai model negara yang menggabungkan Islam "moderat" dengan sekularisme region tersebut. (Murinson, 2012)

Di sektor domestik, sebelum AKP berkuasa di Turki, berdasarkan konstitusi 1981, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) atau Dewan Keamanan Nasional Turki dibentuk dengan fungsi sebagai badan yang mengkoordinasikan kebijakan. Sementara peran penting dalam pengambilan kebijakan luar negeri secara tradisional dipercayakan kepada militer dan birokrasi negara melalui mekanisme MGK. Reformasi institusional dan konstitusional oleh AKP telah membatasi kekuasaan MGK. Elite baru dan jajarannya telah muncul, dengan sikap yang baru

terhadap kebijakan luar negeri dan terhadap pemerintahan. Yang lebih penting, partisipasi publik dalam perdebatan kebijakan luar negeri telah berkembang jauh. (Murinson, 2012)

Ide kebijakan luar negeri yang penting dalam pemikiran baru AKP, dibuat oleh Davutoğlu di Stratejik Derinlik pada tahun 2001, dengan mengemukakan konsep "*Strategic Depth*" untuk memandu kebijakan luar negeri pemerintahan AKP. Asal-usul pendekatan Davutoglu terhadap geopolitik dapat ditelusuri pada pemikiran presiden Özal tentang neo-Ottomanism dan kebijakan luar negeri multi-dimensi dari pemerintah Erbakan di akhir 1990-an. Pembahasan utamanya adalah bahwa "*Strategic Depth*" didasarkan pada kedalaman geografis dan historis. Karena Turki sebagai negara yang dulunya memiliki riwayat yang besar dan kaya dengan nilai historis dan memiliki wilayah geografis yang strategis. "*Strategic Depth*" Ini membekali Turki dengan kesempatan unik dalam ekonomi politik global, yang menurut Davutoğlu, dapat dihasilkan oleh pendekatan yang lebih proaktif dan kooperatif dalam kebijakan luar negeri Turki. Inisiatif kebijakan luar negeri Regional ini bertujuan untuk menciptakan ranah nol masalah (*zero problem*) di sekeliling Turki. (Murinson, 2012)

Menteri Luar Negeri Ahmet Davutoğlu, yang percaya bahwa prioritas utama kebijakan luar negeri Turki adalah untuk melayani kepentingan ekonomi negara. Ahmet Davutoğlu mengemukakan pendekatan kebijakan luar negeri "*Zero Problem*", yang menekankan ke sama daripada konfrontasi. Dengan kata lain, Turki memandang seluruh dunia sebagai "kawan atau berpotensi menjadi kawan". Alih-alih melihat Rusia, Iran dan negara-negara Arab sebagai ancaman keamanan, Turki memandang mereka sebagai pasar ekspor potensial dan mitra energi. Hubungan

baik dengan Israel dan dunia Arab memberi posisi tawar yang lebih bagi Turki dari segi diplomatik dan ekonomi. Demikian pula, hubungan persahabatan Turki dengan Iran dan negara-negara Barat memberikan Turki posisi tawar yang lebih kuat dalam negosiasi nuklir. (Habibi, 2016) Asosiasi bisnis utama di Turki berhasil melobi pemerintah untuk meningkatkan hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Irak dan wilayah Kurdi. Demikian pula, Federasi Usaha dan Industrialis Turki meyakinkan AKP untuk memperkuat hubungan diplomatik dan ekonomi dengan negara-negara Afrika. Sementara itu, Rusia dengan cepat menjadi mitra dagang terbesar kedua Turki setelah Jerman dan pemasok utama gas alam. Volume perdagangan antara Iran dan Turki meningkat dari 1,2 miliar USD pada tahun 2002 menjadi 213 miliar USD pada tahun 2012. (Habibi, 2016)

Davutoğlu juga menyampaikan bahwa visi dan misi dari kebijakan luar negeri Turki adalah di antaranya, memenuhi seluruh persyaratan untuk menjadi anggota Uni Eropa dan menjadi anggota yang memiliki pengaruh di dalam Uni Eropa di tahun 2023, mengupayakan integrasi regional dalam bidang kerja sama keamanan dan kerja sama ekonomi, berusaha untuk melaksanakan peranan yang lebih berpengaruh dalam menyelesaikan konflik regional, secara aktif berturut serta dalam semua arena global, memiliki peran penting dalam organisasi internasional dan mampu menjadi bagian dari 10 negara dengan perekonomian terbesar dunia. (Alfan, 2015)

Di bawah AKP, kebijakan luar negeri secara bertahap datang di bawah kontrol sipil, sementara militer dengan cara politik dijauhkan dari proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Partai ini menghindari konfrontasi langsung dengan Amerika Serikat dan menyatakan upaya untuk menjadi anggota

Uni Eropa sebagai tujuan utamanya. Amerika Serikat bahkan pernah mencoba untuk menekan negara-negara Eropa untuk mempercepat proses integrasi Turki ke Eropa atas dasar andil Turki dalam kasus Irak. Namun upaya Amerika Serikat, gagal dalam meyakinkan para pemimpin Eropa pada pertemuan puncak di Kopenhagen dan keputusan itu ditunda sampai tahun 2004. (Murinson, 2012) Berulang kali kecewa dengan sekutu Barat-nya mendorong Turki untuk mencari jalan alternatif dalam kebijakan luar negeri dan dalam negerinya. Di saat itu Rusia menjadi kandidat yang kuat bagi kebijakan luar negeri Turki, terutama setelah dimulainya pembangunan proyek gas alam *Blue Stream* pada tahun 2002 yang menandakan perkembangan penting bagi keamanan energi Turki. Turki semakin tergantung pada pasokan gas alam Rusia, dan sektor pariwisatanya, sumber pendapatan yang signifikan bagi perekonomian nasional juga sangat bergantung pada wisatawan Rusia. Selain itu, Rusia telah menjadi pasar yang besar untuk perusahaan konstruksi Turki. (Murinson, 2012)

Selain yang telah di sebutkan sebelumnya, kebijakan luar negeri Turki era pemerintahan AKP juga cenderung aktif di tengah isu-isu dan permasalahan yang melanda masyarakat muslim sehingga politik luar negeri ini sering disebut dengan politik solidaritas muslim (*muslim solidarity*). Pihak yang terpengaruh dalam kebijakan politik luar negeri ini adalah elit-elit politik yang dekat dengan AKP, dan para pelaku bisnis kelas menengah Anatolian di Turki. (Murinson, 2012) Para pelaku bisnis Anatolian ini memiliki pengaruh yang cukup kuat sebagai pendukung terlaksananya perluasan hubungan ekonomi ke wilayah Timur Tengah. Kepentingan ekonomi kelompok-kelompok ini telah memainkan peran penting dalam upaya pemerintah untuk mempromosikan perdagangan yang lebih besar dan

kerja sama ekonomi dengan Timur Tengah. Antara tahun 2002 dan 2008, ekspor Turki ke dunia Arab meningkat lima kali, mencapai 25 miliar USD. Dengan peningkatan yang signifikan dalam produksi industri, Turki telah mengupayakan aktivitas perdagangan (*Competitive Market*) dalam skala besar dengan negara-negara Arab di bidang konstruksi, baja, makanan, dan bahan kimia. Sementara itu, ada kekhawatiran yang berkembang di kalangan elit bisnis Turki bahwa kebijakan "*zero problem*", jika dihadapkan dengan efek destabilisasi dari "*Arab Spring*" dapat memberikan dampak negatif yang mempengaruhi perdagangan regional Turki. (Murinson, 2012)

Selama kepemimpinan AKP, pemerintah Turki memilih pendekatan *soft power* untuk waktu jangka menengah. Tujuan jangka menengah Turki adalah untuk mendapatkan legitimasi domestik dan internasional dengan bergabung dalam Uni Eropa dan memperkuat kelompok negara Developing-8 atau D-8. (Murinson, 2012) Turki juga telah melakukan upaya untuk menjadi penengah dan mediator dari berbagai konflik regional di wilayah Balkan (Kosovo, Bosnia, dan Macedonia), wilayah Kaukasus (Abkhazia, Chechnya, Nagorno-Karabakh, dan Ossetia Selatan), dan wilayah Timur Tengah (konflik Israel-Palestina, negosiasi Suriah-Israel), melalui partisipasinya dalam organisasi antarpemerintah (seperti OSCE, BSEO, dan CEO) dan keanggotaan di NATO serta *UN-sponsored Alliance of Civilizations* (UNAOC). (Murinson, 2012)